

Membangun karakter bangsa melalui pendidikan inklusif di sekolah

Gunarhadi
gunarhadi@fkip.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Pendidikan untuk semua (PUS) menjadi prioritas bagi setiap bangsa. Tuntutan global akan hak atas pendidikan bagi semua individu semakin menjadi perhatian dunia sejak dekade 90an. Ketuntasan literasi suatu bangsa diukur melalui keseriusan bangsa tersebut dalam mewujudkan pendidikan untuk semua warganya. Secara historis, PUS lahir atas prakarsa CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS initiative EDUCATION for ALL (CSOiEFA). Organisasi-organisasi ini merupakan konsorsium organisasi sipil yang peduli akan pentingnya pendidikan melalui pijakan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” oleh PBB tahun 1948, yang menegaskan bahwa: “Setiap orang memiliki hak untuk pendidikan”. Meskipun negara-negara di seluruh dunia dilanda berbagai krisis global baik ekonomi, politik dan demografi, organisasi-organisasi ini memiliki semangat kepedulian yang tinggi untuk menjamin hak pendidikan untuk semua seiring nafas deklarasi tersebut.

A. PENDAHULUAN

dunia menghadapi masalah yang menakutkan seperti, beban utang, ancaman stagnasi dan kemunduran ekonomi, pertumbuhan penduduk yang cepat, pelebaran kesenjangan ekonomi antar bangsa, perang, pendudukan, perang saudara, kejahatan, kekerasan, kematian yang dapat dicegah jutaan anak-anak dan meluas ke kerusakan lingkungan. Masalah ini menghambat upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar. Masalah-masalah ini telah menyebabkan kemunduran besar dalam pendidikan dasar pada 1980-an di banyak negara berkembang. Di beberapa negara lain, pertumbuhan ekonomi telah mampu untuk membiayai perluasan pendidikan, namun demikian, jutaan penduduk tetap dalam kemiskinan, tidak mampu bersekolah atau buta huruf. Di negara-negara industri tertentu juga, penghematan dalam pengeluaran pemerintah selama tahun 1980-an telah menyebabkan kemerosotan pendidikan.

Bangsa yang dikenal memiliki karakter tinggi adalah bangsa yang telah memiliki tingkat kepedulian terhadap pendidikan non-diskriminatif bagi setiap warganya tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosio-

ekonominya. Nuansa pendidikan non-dikriminatif menjadi ruh yang menghidupi tubuh pendidikan inklusif sebagai wadah kesetaraan warga belajar penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif itu pula yang merupakan ajang pendidikan karakter yang menggerakkan semangat ekualitas semua individu untuk saling menghormati, saling menghargai dan saling mengangkat martabat sesama.

Kepedulian yang tinggi terhadap hak atas pendidikan terutama bagi kaum marginal akhirnya memunculkan gagasan global melalui Konferensi Hak Anak pada tahun 1989. Akhirnya pada tanggal 5-9 Maret 1990 di Jomtien, Thailand, 115 negara dan 150 organisasi bertemu dan mengadakan Konferensi Dunia membahas *Education for All (EFA)* atau Pendidikan Untuk Semua (PUS). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, perlu koalisi yang luas antara pemerintah nasional, kelompok masyarakat sipil, dan lembaga pembangunan seperti UNESCO dan Bank Dunia. Mereka berkomitmen untuk mencapai tujuan pendidikan antara lain: 1) memperluas dan meningkatkan perawatan anak usia dini yang komprehensif dan pendidikan, terutama bagi yang paling rentan dan anak-anak yang kurang beruntung, 2) semua anak, khususnya anak perempuan, anak termarginalkan, dan mereka yang termasuk etnik minoritas, memiliki akses lengkap dan gratis memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas baik ; 3) kebutuhan belajar semua anak dapat terpenuhi melalui akses yang adil untuk memperoleh pendidikan dan program ketrampilan hidup; 4) menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan dasar dan menengah, dan mencapai kesetaraan gender untuk mendapatkan pendidikan dasar dengan kualitas yang baik.

Komitmen selanjutnya diwujudkan dalam konferensi Internasional di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 dengan menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan “Salamanca Statement” tentang kerangka aksi pendidikan untuk semua melalui pendidikan inklusif terutama bagi anak-anak termarginalkan. Pernyataan tersebut didasari keyakinan peserta Konggres bahwa: 1) setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan; 2) setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda; 3) sistem pendidikan seyogyanya dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman

karakteristik dan kebutuhan belajar tersebut; 4) penyandang disabilitas hendaknya memperoleh akses pendidikan di sekolah reguler dengan pendekatan pedagogis yang berpusat pada kebutuhan individu anak; 5) sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi dalam rangka membentuk masyarakat yang inklusif.

Satu dekade kemudian, komitmen masyarakat internasional menegaskan kembali komitmennya terhadap Pendidikan Untuk Semua di Dakar, Senegal, pada 26-28 April 2000. Pada konferensi itu sejumlah 189 negara dan mitra mereka mengadopsi dua dari delapan tujuan Pendidikan Untuk Semua yang dikenal dengan nama *Millenium Development Goals (MDG)* yaitu *MDG 2* mengenai pendidikan dasar dan universal serta *MDG 3* mengenai kesetaraan jender dalam pendidikan pada tahun 2015. Hasil konferensi ini akhirnya menjadi komitmen global yang ditetapkan UNESCO sebagai tonggak internasional pendidikan inklusif.

A. Pendidikan Untuk Semua di Indonesia

Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dasar dalam 20 tahun terakhir ini. Terbukti rasio bersih anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 94 persen. Tapi Indonesia tetap belum berhasil memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi semua anak. Fakta membuktikan sebagian besar anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan adalah anak-anak termarginalkan, kesulitan sosioekonomi, dan atau memiliki hambatan tersendiri sebagai penyandang disabilitas. Apalagi, masih banyak masalah lain yang harus dihadapi sehingga kaum disabilitas belum mendapatkan prioritas perhatian untuk memperoleh pendidikan, masalah tersebut antara lain: 1) jumlah anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan masih tinggi; 2) jumlah anak-anak putus sekolah masih tinggi, diperkirakan masih ada dua juta anak; 3) jumlah guru dengan kualifikasi yang dibutuhkan masih belum mencukupi; 4) proses pembelajaran belum mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan anak secara individu terutama bagi penyandang disabilitas; 5) manajemen sekolah belum mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif; 6) kurangnya keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan pendidikan

inklusi; 7) faktor biaya yang belum memungkinkan mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Untuk Semua, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNICEF dan UNESCO melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Menggunakan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk melakukan penelusuran dan penjaring semua anak di bawah 18 tahun yang tidak bersekolah; 2) Menggalakkan Program Wajib Belajar 9 tahun bagi anak usia 6 sampai 15 tahun; 3) Program Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidikan Anak dengan melibatkan guru dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menantang bagi siswa.

B. Hakekat Pendidikan Inklusif

1. Pengertian

Dalam arti luas, pendidikan inklusif dimaknai sebagai proses layanan yang merespon terhadap perbedaan individu peserta didik agar sedapat mungkin anak tersebut bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan anak lain, sehingga anak merasa mendapatkan manfaat dari kegiatan belajar tersebut (Ainscow, 2003). Sedangkan dalam arti sempit pendidikan yang mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak seusianya di sekolah reguler.

2. Orientasi Pendidikan Inklusif.

Pendidikan inklusif berorientasi terwujudnya dua aspek capaian keterampilan; yaitu aspek akademik dan aspek sosial. Melalui kegiatan pembelajaran yang diberikan di sekolah reguler anak berkebutuhan khusus diharapkan dapat memperoleh kemampuan akademik. Di sisi lain, melalui kegiatan pembauran, anak berkebutuhan khusus mendapatkan pengalaman sosial yang pada akhirnya seorang anak dapat beradaptasi dalam kehidupan secara mandiri dalam masyarakat.

3. Karakteristik Lingkungan Sekolah Inklusif.

Sekolah Inklusif merupakan lingkungan yang menjamin bahwa anak berkebutuhan khusus dapat merasa aman dan nyaman secara fisik, psikologis, dan sosial. Secara fisik, sekolah inklusif mesti dilengkapi sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Dari sisi sosial psikologis, warga sekolah seyogyanya terbuka terhadap keberadaan penyandang disabilitas, sehingga anak merasa nyaman karena dapat diterima kehadirannya di

sekolah tersebut. Dengan demikian, anak tersebut dapat merasakan kebebasan beraktualisasi diri baik dalam proses pembelajaran maupun proses interaksi dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

4. Karakteristik Peserta Didik di Sekolah Inklusif

Peserta didik di sekolah inklusif terdiri dari anak-anak yang tidak memiliki hambatan belajar dan anak-anak dengan hambatan fisik, intelektual, sosial-emosional, atau perilaku. Hambatan fisik mungkin berupa hambatan visual, auditoris, atau motorik. Anak dengan hambatan visual memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak yang memiliki hambatan auditoris atau hambatan pendengaran, dan berbeda pula dengan anak yang memiliki hambatan motorik seperti yang dikenal dengan tunadaksa. Hambatan intelektual bisa berupa tuna grahita, lamban belajar atau kesulitan belajar. Sedangkan hambatan sosial emosional berupa ketuna larasan, atau hambatan autisme dengan karakteristik kesulitan berinteraksi.

Pada sisi psikologis, anak berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam kadar tertentu anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan sosial psikologis yang sering ditandai dengan rasa kurang percaya diri, mudah tersinggung, sulit menyesuaikan diri, sulit mengendalikan diri, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian tersendiri dari orang lain. Akibat dari hambatan itu, keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus sering dikenal dengan anak-anak yang memiliki motivasi, minat dan disiplin yang berbeda dengan anak-anak lain pada umumnya.

5. Karakteristik Pembelajaran di Sekolah Inklusif.

Pembelajaran di sekolah inklusif ditandai dengan proses menyampaikan kegiatan belajar yang berorientasi pada kebutuhan dan kemampuan belajar secara individu. Pembelajaran bagi anak dengan hambatan visual akan sangat berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan bagi anak dengan hambatan pendengaran. Demikian halnya, pembelajaran bagi anak dengan hambatan intelektual sangat berbeda dengan pembelajaran bagi anak dengan hambatan perilaku atau hambatan interaksi.

Dari sisi pengelolaan, proses pembelajaran bisa dilakukan dalam setting klasikal, kelompok kecil, dan atau individual. Sedangkan dari sisi strategi pembelajaran dilakukan melalui pendekatan terdiferensiasi yaitu memberikan perlakuan berdasarkan gaya belajar masing-masing anak secara individual.

C. Membangun Kepedulian Masyarakat Sekolah

1. Peran Sekolah

a. Welcoming school.

Sekolah inklusif harus menerima secara terbuka kehadiran anak dengan hambatan apapun untuk mendapatkan layanan pendidikan disekolah tersebut.

- b. Kebijakan yang berpihak pada pendidikan untuk semua
Sekolah yang sudah menyatakan diri sebagai sekolah inklusif harus menetapkan kebijakan terkait dengan berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan pendidikan bagi semua anak termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang ada di sekolah tersebut.
- c. Memfasilitasi aksesibilitas fisik dan acceptibilitas sosial.
Sekolah inklusif seyogyanya menyediakan sarana prasarana aksesibilitas sehingga penyandang disabilitas mendapat kemudahan untuk menjangkau setiap lokasi untuk belajar dan berinteraksi dengan teman teman sebayanya. Demikian halnya dengan masyarakat sekolah, guru, murid, dan seluruh staff harus menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus sehingga terjalin ikat kekerabatan dan kepedulian sesama diantara anggota masysrakat sekolah tersebut. Kondisi seperti inilah yang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Mereka akan merasa aman dan nyaman berada di sekolah karena masyarakat sekolah menerima dengan sikap yang ramah terhadap kehadirannya di sekolah tersebut.

d. Kolaborator dengan pihak luar sebagai supporting system.

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan di sekolah, pihak sekolah perlu menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti Sekolah Luar Biasa, psikolog, atau konselor, serta pihak pihak lain yang diperlukan bagi layanan anak berkebutuhan khusus secara komprehensif sesuai kebutuhan masing masing anak baik secara medis, terapis di luar pembelajaran.

e. Partner dengan orang tua dalam membangun mutu layanan.

Orang tua anak berkebutuhan khusus diharapkan dapat berpartisipasi lebih inten bagi pendidikan anaknya di sekolah inklusif. Orang tua memiliki lebih banyak pengetahuan tentang anaknya. Anak memiliki lebih banyak waktu dengan orang tuanya di rumah ketimbang di sekolah. Dengan demikian orang tua hendaknya menjadi partner kerja dengan sekolah yang dapat membantu proses pembelajaran

2. Peran Guru Pendidikan Inklusif

- a. Merespon keberagaman gaya belajar di kelas
- b. Memahami hambatan yang dialami anak
- c. Memahami dampak kesulitan yang dirasakan anak
- d. Meyakinkan anak dapat mengatasi kesulitan yang dialami anak.
- e. Membantu upaya anak dalam mengatasi kesulitannya.

- f. Memberi tugas sesuai dengan kemampuan anak
- g. Memfasilitasi interaksi harmonis diantara anak-anak dalam kelompok.
- h. Menyiapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan anak secara kelompok maupun secara individual.
- i. Memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak.
- j. Menyediakan media pembelajaran sesuai dengan hambatan yang dialami masing –masing anak berkebutuhan khusus.

3. Peran Staff Pendukung

- a. Memfasilitasi interaksi pembauran semua anak
- b. Memfasilitasi akses sosial anak dengan anak dunia luar.
- c. Memfasilitasi kegiatan akademik dan kegiatan sosial di luar kelas.
- d. Memfasilitasi komunikasi dengan orang tua

DAFTAR RUJUKAN

- Ainscow, M. (2003). *Developing inclusive education system : What are the levers for change : Key note Speech in International Conference on Inclusive Education*, The Hong Kong Institute of Education, 16-19 December.
- Ballard, K. (2005). *Inclusive education: International voices on disabilities and justice*. Chesnut, Philadelphia: Taylor & Francis e-Library.
- Desliana Maulipaksi. (2017). *Sekolah inklusi dan pembangunan SLB dukung pendidikan inklusi*. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>. Diunduh 12 Sept 2107
- Gregory, G., H. & Chapman, C. (2007). *Differentiated instructional strategies: One size does not fit all*. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
- Gunarhadi, Sunardi, Mohammad Anwar, Tri Rejeki Andayani. (2016). The effect of cluster-based instruction on mathematic achievement in inclusive schools. *International Journal of Special Education*, 31, (1), 78-87.
- Mujito. (2013). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat PKLK Pendidikan Dasar, Dirjen Dikdas, Kemdikbud.
- Peters, S., J. (2007). Education for all: A historical analysis of instructional inclusive education policy and individuals with disabilities. *Journal of Disabilities Studies*, 18,(2), 98-108

Salamanca Statement and Framework for Action (1994). *World conference on special needs education: Access and quality*. Salamanca: UNESCO.

UNESCO (2000). *The Dakar Framework for Action on Education for All: Meeting our collective Commitments*. Paris: UNESCO